

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama bertahun-tahun, ekonomi Kota Kediri sangat bergantung pada industri besar, khususnya industri kretek. Struktur PDRB Kota Kediri kebanyakan ditopang oleh perusahaan besar seperti PT Gudang Garam Tbk, yang menyumbang hampir 70% dari struktur ekonomi kota, sehingga Kota Kediri dikenal sebagai "kota terkaya" di Jawa mendahului beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang tinggi di Kota Kediri menjadikan diversifikasi ekonomi sebagai tantangan besar. Namun dalam beberapa tahun terakhir terjadi pergeseran arah pembangunan ekonomi ke arah yang lebih majemuk. Pemerintah Kota Kediri mulai mendorong diversifikasi ekonomi, antara lain melalui penguatan sektor UMKM, pengembangan ekonomi kreatif, serta pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas melalui program seperti Prodamas (Pemerintah Kota Kediri, 2022).

Tabel 1. 2 Produk Domestik Regional Bruto Kota di Jawa 2024

No.	Kota	PDRB per Kapita (juta Rp)
1.	Kota Kediri	Rp565,8 Juta
2.	Kota Jakarta	Rp344,4 juta
3.	Kota Cilegon	Rp302,9 Juta
4.	Kota Surabaya	Rp264,4 Juta
5.	Kota Semarang	Rp156,6 Juta
6.	Kota Bandung	Rp147,1 Juta
7.	Kota Yogyakarta	Rp131,4 Juta
8.	Kota Surakarta	Rp122,5 Juta
9.	Kota Malang	Rp114,7 Juta

10.	Kota Tangerang	Rp114,5 Juta
<i>Sumber: GoodStats 2025</i>		

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Kediri mengagus sebuah inisiatif pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas). Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 Ayat 2, disebutkan bahwa fungsi pemerintahan mencakup pelaksanaan administrasi pemerintahan yang terdiri dari pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan. Salah satu aspek penting dari fungsi pemerintahan adalah pemberdayaan, yang berperan dalam mendorong peningkatan proses pembangunan di wilayah pemerintahan Negara Republik Indonesia. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *“peoplecentered, participatory, empowering, and sustainable”* (Chambers, dalam Suaib, 2023). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 12 yang mengatur tentang pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat dan desa termasuk dalam urusan pemerintahan yang bersifat wajib, namun tidak terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Ayat (2). Salah satu aspek yang tercantum dalam huruf (g) mencakup kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Program ini dijalankan di tingkat kelurahan, dengan Rukun Tetangga (RT) sebagai pelaksana utama, dan berada di bawah koordinasi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kediri. Prodamas pertama kali diperkenalkan sebagai bagian

dari komitmen politik pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Mas Abu dan Ning Lik, saat kampanye Pilkada tahun 2013. Program ini hadir sebagai respons terhadap belum optimalnya pelaksanaan percepatan dan pemerataan pembangunan di wilayah Kota Kediri (Ussyifa,2023). Pemerintah Kota Kediri merancang Prodamas sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga melalui pembangunan yang bersifat partisipatif, dan melibatkan peran aktif masyarakat. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 menjadi dasar hukum pelaksanaan program ini, yang menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi pemberdayaan guna mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Tujuan utama dari Prodamas yang dilihat dari Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 adalah memperkuat kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan lokal. Program ini mulai diimplementasikan pada tahun 2015 dan berlangsung hingga 2019.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yanuarita dan Irene (2021) dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Kediri kemudian meningkatkan alokasi anggaran Prodamas menjadi Rp100 juta per RT setiap tahun . Program ini sejatinya direncanakan mulai berjalan pada tahun 2020, namun karena pandemi Covid-19, sebagian besar dana dialihkan untuk penanganan wabah tersebut sehingga pelaksanaannya baru dapat direalisasikan pada tahun 2021. Selanjutnya, pelaksanaan Prodamas Plus tahun 2022 diatur melalui Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Prodamas Plus Tahun 2022. Sehingga Prodamas ini kemudian

Cakupan bidang Prodamas awalnya mencakup tiga bidang, yaitu infrastruktur, sosial budaya, dan ekonomi. Sementara itu, Prodamas Plus memperluas cakupan menjadi enam bidang, dengan menambahkan pendidikan, kesehatan, dan kepemudaan. Perluasan ini memungkinkan program untuk menyentuh lebih banyak aspek kehidupan masyarakat dan memberikan manfaat yang lebih luas. Cakupan bidang tersebut meliputi beberapa aspek yaitu pada peningkatan dan perbaikan infrastruktur dasar yang diperlukan untuk mendukung aktivitas masyarakat, seperti pembangunan tempat pertemuan RT/RW, taman, dan fasilitas umum lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat. Pada peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat seperti memperkuat peran dan mempermudah akses ke Posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar, termasuk pemeriksaan kesehatan ibu dan anak. Selain itu pada aspek pendidikan dalam Prodamas Plus bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat lokal seperti memberikan bantuan perlengkapan sekolah kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu agar dapat menjalani pendidikan dengan baik.

Selanjutnya pada aspek ekonomi, Prodamas Plus memberikan dukungan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pelatihan manajemen usaha dan akses modal, selain itu Pemkot Kediri dalam Prodamas Plus juga mendirikan kampung keren, sebagai pusat aktivitas UMKM lokal, ekonomi kreatif, dan kolaborasi warga. Kampung ini bertujuan untuk mendukung produksi produk lokal dan memperluas jaringan pemasaran masyarakat. Selanjutnya pada aspek sosial Prodamas plus mendorong warga untuk terlibat dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari

perencanaan hingga evaluasi seperti membentuk kelompok masyarakat yang bertugas untuk mengawasi dan berkontribusi dalam pelaksanaan program di daerah mereka. Dan aspek terakhir adalah kepemudaan, Prodamas Plus menyediakan pelatihan keterampilan bagi pemuda di berbagai bidang seperti mengajarkan keterampilan membuat produk kerajinan lokal yang dapat dijual, sehingga mendorong kewirausahaan di kalangan pemuda lewat pelatihan-pelatihan di tiap kelurahan melalui karang taruna. Sistem pengelolaan dalam Prodamas, pengelolaan program dilakukan oleh kelurahan.

cakupan bidang yang bertambah juga telah menciptakan program-program baru antara lain masyarakat telah merasakan kualitas sarana prasarana yang meningkat, koperasi-koperasi RW yang diperkuat, berdirinya sarana penunjang ilmu bagi masyarakat khususnya anak-anak yaitu English massive dan Quran Massive, serta pelatihan bebas berkreasi bagi para pemuda. Seluruh program tersebut tercipta karena adanya Prodamas Plus (Ussyifa, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Farhan Aliyafi (2023) menunjukkan juga bahwa Prodamas Plus mendukung inisiatif pembentukan kampung keren melalui pelatihan, dukungan modal, dan pendampingan ekonomi kreatif masyarakat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Intervensi ini mendorong UMKM berkembang menjadi aktivitas ekonomi yang *sustainable*, dengan dampak jangka menengah hingga panjang (Aliyafi, 2023).

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 32 Tahun 2021, Pada Prodamas Plus pengelolaan program langsung dilakukan oleh kelompok masyarakat dengan tujuan meningkatkan keterlibatan aktif mereka dalam pengambilan keputusan

serta pelaksanaan kegiatan. Usulan kegiatan pada Prodamas sepenuhnya berasal dari masyarakat, namun pada Prodamas Plus terdapat beberapa kegiatan yang diwajibkan atau ditugaskan oleh Pemerintah Kota Kediri, meskipun prioritas tetap diberikan pada usulan masyarakat. Selain itu, pada Prodamas seluruh anggaran dialokasikan langsung ke kelurahan, sedangkan pada Prodamas Plus dana disalurkan kepada perangkat daerah yang bertanggung jawab atas beberapa kegiatan dan mengelola anggaran tersebut. Hal ini memungkinkan pengelolaan dana yang lebih terorganisir dan sesuai dengan kebutuhan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota. Untuk pendampingan, Prodamas menggunakan tenaga yang dikontrak oleh kelurahan, sementara pada Prodamas Plus pendampingan dilakukan melalui kerja sama dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Dengan melibatkan LPM dan PTN, diharapkan pendampingan yang diberikan lebih berkualitas dan berbasis pada pengetahuan serta pengalaman yang relevan. Sehingga program ini berjalan dimulai dari tingkat RT dengan membuat proposal usulan yang diserahkan ke kelurahan sampai kecamatan dan kota yang selanjutnya akan ditangani langsung oleh BAPPEDA.

Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus (Prodamas Plus), tidak serta-merta setiap Rukun Tetangga (RT) secara otomatis mendapatkan dana sebesar Rp100 juta. Angka tersebut merupakan alokasi maksimal yang dapat diterima oleh masing-masing RT per tahun, dengan catatan bahwa dana tersebut harus diajukan melalui proses pengusulan kegiatan secara sistematis dan berdasarkan kebutuhan riil

masyarakat. Mekanisme ini diatur secara rinci dalam Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Prodamas Plus.

Proses pengajuan kegiatan dilaksanakan secara berjenjang dan dimulai dari Musyawarah Lingkungan (Musling) atau rembug warga yang dilaksanakan di tingkat RT. Musyawarah ini menjadi forum partisipatif di mana masyarakat, tokoh lingkungan, dan pengurus RT berkumpul untuk membahas dan merumuskan kebutuhan serta aspirasi pembangunan di wilayahnya. Hasil dari musyawarah tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen usulan kegiatan yang disusun oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas). Pokmas adalah pelaksana teknis kegiatan yang dibentuk oleh masyarakat, dan bertanggung jawab terhadap seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan. Dokumen yang disusun oleh Pokmas harus memenuhi ketentuan administratif yang terdiri atas Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta dokumen pendukung teknis lain seperti gambar kerja jika infrastruktur, jadwal pelaksanaan, dan daftar kebutuhan. Selain itu, Pokmas juga harus menandatangani pakta integritas dan surat kesanggupan melaksanakan kegiatan secara swakelola, sebagaimana menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan Prodamas Plus.

Usulan tersebut selanjutnya akan melalui proses verifikasi teknis dan evaluasi kelayakan oleh tim verifikator di tingkat kelurahan dan kecamatan. Dalam proses ini, tidak semua usulan akan disetujui secara utuh. Beberapa pertimbangan yang digunakan dalam menyetujui atau menolak sebagian usulan meliputi kelayakan teknis, urgensi kebutuhan masyarakat, kesesuaian dengan prioritas bidang kegiatan Prodamas Plus,

kesiapan pelaksana, serta riwayat pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian, besarnya dana yang dicairkan untuk masing-masing RT sangat bergantung pada kualitas perencanaan dan dokumen usulan yang diajukan oleh Pokmas. Jika usulan kegiatan disusun dengan baik, realistik, dan sesuai dengan ketentuan bidang kegiatan yang diperbolehkan dalam Prodamas Plus, maka dana dapat dicairkan mendekati atau hingga batas maksimal Rp100 juta. Sebaliknya, jika terdapat kekurangan dalam dokumen atau kegiatan dianggap tidak relevan, maka besarnya dapat dikurangi, atau pencairan ditunda (Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 32 Tahun 2021).

Setelah disetujui, pencairan dana dilakukan dengan metode pembayaran langsung (LS) oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri kepada rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas) pelaksana swakelola. Setelah Pokmas menyelesaikan pelaporan, pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang memuat laporan realisasi fisik dan keuangan, disertai dokumen pendukung seperti bukti pengeluaran, dokumentasi kegiatan, dan laporan kegiatan secara naratif. Dengan model pencairan bertahap dan berbasis hasil evaluasi, maka menjadi jelas bahwa tidak semua RT secara otomatis memperoleh dana Rp100 juta, melainkan harus melalui sistematika pengajuan dan seleksi yang terukur. Hal ini menjadi mekanisme kontrol agar dana publik yang disalurkan melalui Prodamas Plus benar-benar digunakan secara efisien, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah masing-masing (Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 32 Tahun 2021).

Kenaikan PDRB Kota Kediri dalam lima tahun terakhir juga menunjukkan tren yang stabil dan signifikan, yang salah satunya dapat dikaitkan dengan adanya Program Pemberdayaan Masyarakat Plus (Prodamas Plus) yang dijalankan Pemerintah Kota Kediri. Sejak Prodamas Plus dikembangkan, program ini memberikan dorongan pada aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. Melalui alokasi anggaran langsung ke lingkungan, masyarakat memiliki ruang yang lebih besar untuk membenahi infrastruktur dasar, meningkatkan akses layanan, serta mendorong munculnya kegiatan usaha kecil di wilayah masing-masing. Perbaikan infrastruktur lingkungan seperti jalan, drainase, dan fasilitas umum secara tidak langsung menciptakan iklim ekonomi yang lebih kondusif. Lingkungan yang lebih tertata membuka peluang bagi pelaku usaha rumahan, memperlancar mobilitas masyarakat, dan meningkatkan akses terhadap pasar. Selain itu, Prodamas turut memicu tumbuhnya aktivitas ekonomi produktif melalui pelatihan, kegiatan wirausaha, dan pemberdayaan komunitas. Aktivitas ekonomi yang semakin hidup di tingkat akar rumput inilah yang kemudian memberi kontribusi pada peningkatan nilai tambah daerah.

Secara keseluruhan, meningkatnya PDRB Kota Kediri dari Rp462,20 pada tahun 2020 hingga mencapai Rp565,84 pada tahun 2024 meski bukan satu-satunya faktor. Melalui program ini, pemerintah Kota Kediri menyalurkan dana sebesar 100 Juta/Tahun/RT untuk mendukung pembangunan masyarakat hingga ke tingkat RT. Selain itu, Menurut data dari Radar Kediri (2024), jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Kediri terus mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, yakni mencapai 10.676 UMKM pada tahun 2023. Pertumbuhan ini menjadi

sinyal positif dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, karena UMKM terbukti mampu menopang perekonomian lokal, Sehingga di sektor informal ini Prodamas Plus diharapkan mampu memberi dampak langsung dan signifikan, sebab pendekatan program yang berbasis RT/RW memang sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat informal.

Namun, meskipun Prodamas Plus telah berjalan selama beberapa tahun, sejumlah permasalahan masih ditemukan dalam pelaksanaannya, khususnya dalam bidang pemberdayaan ekonomi. Dilihat dari beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemanfaatan dana Prodamas Plus masih didominasi oleh pembangunan infrastruktur fisik, sedangkan bidang ekonomi yang berpotensi langsung meningkatkan pendapatan masyarakat belum dikelola secara optimal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Angellia Nur Rahmayanti (2024) di kelurahan Kaliombo masih lebih banyak difokuskan pada kegiatan pembangunan fisik, seperti perbaikan saluran irigasi dan pengadaan barang-barang lingkungan.

Selanjutnya, Jika dilihat dari implementasi Prodamas Plus yang ada di Kelurahan Ngampel Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mona Nisa Ussyifa (2023), program ini memang telah menghasilkan berbagai luaran. Pada bidang infrastruktur, pembangunan seperti jalan, lampu jalan, drainase, hingga balai RT dilaksanakan dan membawa dampak positif terhadap mobilitas warga dan pemasaran hasil pertanian. Namun, di sisi lain, realisasi pada bidang ekonomi justru tergolong minim. Padahal, di tengah kondisi pemulihan pasca-COVID-19, masyarakat sangat membutuhkan dukungan ekonomi produktif. Usaha ekonomi yang dikembangkan

melalui Prodamas Plus di Kelurahan Ngampel berupa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dijalankan di masing-masing RT. KUBE tersebut rata-rata bergerak di bidang katering, seperti nasi kotak dan kue, serta menjadi media pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga. Walaupun secara sosial hal ini dapat meningkatkan kreativitas warga, secara ekonomi, kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan warga secara luas masih terbatas dan belum signifikan (Ussyifa, 2023).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novie Setianingsih dan Setiadi (2022) membuktikan bahwa Prodamas Plus memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di Kota Kediri. Dalam studi yang dilakukan di 13 kelurahan di Kecamatan Majoroto tersebut, diketahui bahwa Prodamas Plus tidak hanya berdampak pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan pendapatan masyarakat melalui kegiatan sosial dan ekonomi yang berbasis komunitas. Selain itu, dampak dari implementasi Prodamas Plus terlihat dari berbagai indikator makro dan mikro ekonomi Kota Kediri (Setianingsih & Setiadi, 2022).

Dalam Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 32 Tahun 2021 dapat diketahui juga bahwa sasaran dari Program Pemberdayaan Masyarakat Plus (Prodamas Plus) adalah masyarakat Kota Kediri secara menyeluruh, dengan titik fokus pelaksanaan di tingkat Rukun Tetangga (RT) di setiap kelurahan masing-masing, sebagai unit terkecil pemerintahan yang paling dekat dengan kebutuhan warga. Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat dari bawah ke atas, dengan pendekatan partisipatif, swakelola, dan berbasis musyawarah lokal. Total ada 1.478 RT dalam 46 Kelurahan di

Kota Kediri yang ikut melaksanakan program ini. Selain diterapkan pada seluruh kelurahan, Pemerintah Kota Kediri juga melakukan pemantauan dan evaluasi rutin melalui *Prodamas Plus Award*, Pemerintah Kota Kediri menggandeng Radar Kediri untuk menyelenggarakan *Prodamas Plus Award* yang diikuti oleh seluruh RT pada masing-masing Kelurahan di Kota Kediri. Pada *Prodamas Award 2023* terdapat beberapa kategori yang dimana di setiap kategorinya dipilih yang terbaik, beberapa kategori tersebut seperti Infrastruktur, Ekonomi, Sosial, Budaya, Kesehatan, Pendidikan, dan Partisipasi Masyarakat. *Prodamas Plus Award 2023* memiliki mekanisme penilaian kinerja untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program di masing-masing kelurahan. Beberapa kelurahan tercatat pernah menjadi pelaksana terbaik berdasar kategori tersebut, berikut adalah kelurahan yang mendapatkan penghargaan atau menonjol dalam pelaksanaan *Prodamas Plus Award 2023*:

Tabel 1. 4 Kelurahan Pemenang Prodamas Award 2023

No.	Kecamatan	Kelurahan	Juara Prodamas Plus Award 2023
1.	Pesantren	Burengan	Kategori RT Pelaksana Terbaik Bidang Infrastruktur diraih oleh RT 01 RW11 Kelurahan Burengan
2.	Kota	Jamsaren	kategori RT Pelaksana Terbaik Bidang Ekonomi diraih RT 39 RW 09 Kelurahan Jamsaren.
3.	Kota	Ringinanom	Kategori RT Pelaksana Terbaik Bidang Sosial, Budaya dan Kesehatan diraih RT 01 RW 01 Kelurahan Ringinanom.
4.	Pesantren	Singonegaran	kategori RT Pelaksana Terbaik Bidang Pendidikan dan Kepemudaan diraih RT 10 RW 03 Kelurahan Singonegaran.
5.	Mojoroto	Ngampel	Kategori RT Pelaksana Terbaik Bidang Partisipasi Masyarakat

			dan Kinerja RT diraih oleh RT 24 RW 04 Kelurahan Ngampel.
--	--	--	-----------------------------------------------------------

Sumber: Website Pemerintah Kota Kediri 2022

Prestasi tersebut memperlihatkan adanya variasi capaian antar-kelurahan dalam mengelola program Prodamas Plus. Kelurahan yang masuk kategori terbaik umumnya menunjukkan karakteristik yang serupa, yaitu tingginya tingkat partisipasi masyarakat, kemampuan perangkat kelurahan dan Pokmas dalam mengorganisir kegiatan, serta inovasi dalam pemanfaatan anggaran untuk menjawab kebutuhan lokal. Selain itu, keberhasilan ini juga menggambarkan kesiapan kapasitas kelembagaan kelurahan dalam mengelola program yang bersifat tahunan dan melibatkan seluruh RT.

Salah satu kelurahan terbaik yang secara konsisten menjadi juara pelaksana terbaik adalah Kelurahan Burengan. Kelurahan Burengan telah menjadi peserta Prodamas Plus sejak tahun 2015 dan sampai tahun 2024 telah aktif dan berinovasi selalu dalam pelaksanaan Prodamas Plus di wilayahnya. Setelah memahami dinamika tersebut, posisi Kelurahan Burengan menjadi menarik untuk diteliti lebih jauh karena merupakan kelurahan yang pernah berhasil juga meraih Juara I sebagai Kelurahan Terbaik pada tingkat kota pada Prodamas Plus Award 2022. Prestasi ini menjadikan Burengan sebagai contoh representatif dari pelaksanaan Prodamas Plus yang dianggap paling berhasil oleh Pemerintah Kota Kediri. Selain itu, Burengan juga memiliki karakteristik sosial ekonomi yang cukup heterogen, tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, serta kapasitas Pokmas dan perangkat kelurahan yang dinilai lebih optimal dibandingkan kelurahan lainnya. Kondisi ini menjadikan Kelurahan Burengan sebagai

1) Efektivitas; 2) Efisiensi; 3) Kecukupan; 4) Kesamaan; 5) Responsivitas; 6) Ketepatan. Sehingga nantinya program ini dapat dianalisis melalui beberapa kriteria evaluasi yang saling terkait.

Dimulai pada kriteria evaluasi efektivitas program, menurut William N. Dunn Efektivitas (*effectiveness*) adalah berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.

Dari kriteria evaluasi efisiensi, menurut William N. Dunn Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.

Selanjutnya, pada aspek kecukupan, William N. Dunn menjelaskan bahwa Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

Pada aspek kesamaan (*equity*) menurut teori William N. Dunn dijelaskan bahwa kesamaan (*equity*) merupakan kriteria evaluasi yang menekankan pada bagaimana manfaat, beban, dan biaya kebijakan didistribusikan kepada masyarakat. Artinya, bukan hanya tentang apakah sebuah kebijakan efektif atau efisien, tetapi juga apakah hasil dan dampaknya adil dirasakan oleh seluruh kelompok yang menjadi sasaran kebijakan.

Pada kriteria evaluasi Responsivitas (*responsiveness*) menurut William N Dunn adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Kriteria evaluasi terakhir adalah ketepatan (*appropriateness*). Menurut William N. Dunn, ketepatan adalah kriteria evaluasi kebijakan yang menilai apakah suatu kebijakan benar-benar tepat untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi, dan apakah tujuan kebijakan tersebut selaras dengan nilai, norma, serta kebutuhan masyarakat.

Teori Evaluasi Kebijakan dari William N Dunn dipilih untuk menjadi landasan yang tepat untuk memahami sejauh mana keberhasilan implementasi Prodamas Plus di Burengan. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi untuk menilai sejauh mana tujuan program tercapai, tetapi juga untuk mengidentifikasi kelemahan mendasar yang membuat dampaknya terhadap pendapatan masyarakat belum signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini relevan dilakukan agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai potensi Prodamas Plus dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Burengan.

Berdasarkan analisis terhadap sejumlah jurnal relevan, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengevaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Plus (Prodamas Plus), mengingat program ini baru saja berakhir pada penghujung tahun 2024. Sementara itu, penelitian ini mengambil fokus yang berbeda, yakni pada evaluasi Prodamas Plus dalam upayanya meningkatkan pendapatan masyarakat di Kelurahan Burengan, Kota Kediri, yang belum pernah diteliti sebelumnya.

Dengan demikian, teori ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memotret hasil akhir dari program, tetapi juga menganalisis proses dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan program. Hal ini menjadikan

pendekatan teori evaluasi dari William N. Dunn sebagai pilihan yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Teori Evaluasi William N. Dunn dan kriteria evaluasi inilah yang penulis jadikan acuan untuk mengkaji penelitian ini yang berjudul **“Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Plus (Prodamas Plus) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Kelurahan Burengan Kota Kediri.”**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada dampak Prodamas Plus dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Kelurahan Burengan. Oleh Karena itu, terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana evaluasi implementasi program Prodamas Plus dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Kelurahan Burengan Kota Kediri?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini sesuai dengan fokus pada penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan mendeskripsikan program Prodamas Plus ini dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Kelurahan Burengan Kota Kediri.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap pengembangan wawasan akademik, khususnya dalam kajian pemberdayaan masyarakat dan evaluasi kebijakan publik. Temuan dari penelitian ini juga

diharapkan dapat menambah referensi mengenai pelaksanaan program pemberdayaan di level kelurahan, yang berkaitan dengan Prodamas Plus.

- b. Penelitian ini juga berpotensi menjadi referensi yang bermanfaat bagi studi-studi sejenis di masa mendatang.
- c. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk riset-riset lanjutan yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai evaluasi program pemberdayaan masyarakat lainnya. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis aspek keberlanjutan serta pengaruh jangka panjang dari pelaksanaan Prodamas Plus.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu, khususnya dalam ranah evaluasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan wilayah. Temuan dalam penelitian ini juga dapat dijadikan acuan oleh peneliti lain yang ingin melakukan kajian evaluatif terhadap program pemberdayaan masyarakat sejenis di wilayah berbeda.

b. Bagi Pemerintah Kota Kediri

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah Kota Kediri dalam mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan Prodamas Plus di Kelurahan Burengan. Temuan-temuan yang diperoleh dapat digunakan untuk mengidentifikasi kendala yang ada dan memperbaiki aspek-

aspek yang perlu ditingkatkan agar program tersebut lebih efektif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Bagi Kelurahan Burengan

Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak langsung dan tidak langsung dari Prodamas Plus terhadap pendapatan masyarakat di Kelurahan Burengan. Temuan-temuan dari penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program selanjutnya dalam masa depan, terutama dalam menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat setempat.

d. Bagi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam bidang pemberdayaan masyarakat, evaluasi program sosial, dan manajemen kebijakan publik. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada di UPN Veteran Jawa Timur, terutama bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang tertarik pada bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah.